



Indonesia: Proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur melalui Layanan Teknik yang Lebih Baik (Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services - ESP)

Nama Proyek	Proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur melalui Layanan Teknik yang Lebih Baik	
Nomor Proyek	49141-001	
Negara	Indonesia	
Status Proyek	Aktif	
Jenis / Cara Bantuan Proyek	Pinjaman	
Sumber Pendanaan / Nilai	Pinjaman 3455-INO: Percepatan Penyediaan Infrastruktur melalui Layanan Teknik yang Lebih Baik	
	Sumber daya modal biasa	US\$ 148,20 juta
Agenda Strategis	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	
Pendorong Perubahan	Peningkatan tata kelola dan kapasitas Solusi pengetahuan Pengembangan sektor swasta	
Sektor / Subsektor	Pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan perdesaan - Kebijakan air perdesaan, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas	
	Transportasi - Kebijakan transportasi dan pengembangan kelembagaan	
	Air dan infrastruktur dan layanan perkotaan lainnya - Kebijakan perkotaan, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas	
Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender	Tidak ada elemen gender	

Uraian

Proyek Percepatan Penyediaan Infrastruktur melalui Layanan Teknik yang Lebih Baik (*Accelerating Infrastructure Delivery through Better Engineering Services Project*, ESP) akan membantu tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur dari Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). ESP akan memperkuat kapasitas Kementerian PUPR untuk merancang dan melaksanakan secara efisien program peningkatan investasi publik dengan (i) meningkatkan mutu dan dimulai proyek infrastruktur secara tepat waktu, dan (ii) memperkuat sistem manajemen investasi publik di Kementerian PUPR. Dampaknya adalah pencapaian tujuan infrastruktur dari Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian PUPR. Hasilnya adalah penguatan kapasitas Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air untuk merancang dan melaksanakan program investasi publik Kementerian PUPR secara efisien. Keluaran ESP adalah:

Keluaran 1: Peningkatan mutu dan dimulainya proyek infrastruktur secara tepat waktu. Keluaran ini akan mendukung persiapan, perancangan, dan penyampaian sekitar 40 proyek di sektor irigasi, manajemen banjir, air baku, bendungan, pasokan air dan sanitasi, serta jalan nasional. Proyek-proyek infrastruktur ini akan dibiayai terutama dari anggaran pemerintah.

Keluaran 2: Penguatan kapasitas dalam manajemen investasi publik. Keluaran ini akan memperkuat kapasitas Kementerian PUPR dalam perencanaan induk, metodologi survei dan standar rancangan, rekayasa nilai, kajian teknis dan keuangan selama konstruksi, penggunaan kontrak multitalahun bagi pekerjaan sipil, manajemen aset, serta sistem perlindungan dan pengadaan.

Kementerian PUPR, melalui Sekretariat Jenderal, akan menjadi lembaga eksekutif, sedangkan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menjadi lembaga pelaksana. Kementerian PUPR akan membentuk komite pengarah untuk memantau pelaksanaan keseluruhan ESP dan memastikan proyek-proyek yang didukung ESP diprioritaskan untuk pelaksanaan. Kantor koordinasi proyek akan dibentuk pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR guna mendukung komite pengarah. Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air masing-masing akan membentuk (i) kantor manajemen proyek yang dikepalai oleh pimpinan proyek dan didukung oleh staf administrasi; serta (ii) unit pelaksana proyek di dalam Direktorat sektor masing-masing guna memimpin pemilihan konsultan persiapan proyek, dengan partisipasi dari kantor setempat Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air yang berkepentingan, sesuai kebutuhan. Unit pelaksana proyek dan kantor setempat Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air akan membentuk tim-tim proyek untuk meninjau dan menyetujui hasil dari perusahaan konsultan untuk pembayaran langsung oleh ADB. Para konsultan akan dipekerjakan dan dikelola sesuai

Pedoman ADB tentang Penggunaan Konsultan (2013, sesuai revisi dari waktu ke waktu).

Di bawah ESP, sejumlah besar kontrak perusahaan konsultan akan diadakan secara cepat. Mengingat hal ini, dan berdasarkan pengalaman ADB dalam mendukung persiapan proyek-proyek Kerjasama Publik Swasta dalam jumlah besar di India dan di Filipina, ESP akan menerapkan metode dua tahap berikut guna memilih perusahaan konsultan untuk tujuan persiapan proyek: (i) sejumlah perusahaan konsultan akan dipilih untuk menjadi bagian dari panel, dan perusahaan yang dipanelkan tersebut akan dipertahankan hingga 3 tahun secara non-komitmen di bawah kontrak penyampaian tanpa jangka waktu (tahap panelisasi); dan (ii) untuk persiapan proyek individu, pemilihan akan dilakukan dari panel berdasarkan evaluasi proposal teknis lengkap yang diserahkan oleh konsultan bersangkutan (tahap panggilan). Kementerian PUPR akan menerapkan pendekatan dua tahap tersebut untuk pertama kalinya di bawah ESP. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong uji coba pendekatan ini di Kementerian PUPR agar nantinya dapat direplikasi di sektor lain.

Dasar Pemikiran Proyek dan Kaitan dengan Strategi Negara/Regional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memimpin upaya pemerintah untuk mencapai RPJMN 2015-2019 dengan target membangun 3.650 kilometer jalan raya baru, meningkatkan jaringan irigasi untuk menjangkau lahan 1 juta hektar, membangun 49 bendungan, mencapai akses 100% ke air minum, mengurangi daerah kumuh hingga 0%, dan mencapai akses 100% ke sanitasi yang lebih baik, semuanya pada 2019. Selama 2015-2019, program infrastruktur Kementerian PUPR diperkirakan menelan Rp660 triliun atau 47% dari program infrastruktur pemerintah. Pada 2015-2016, Rp207 triliun (sekitar 37% dari anggaran infrastruktur pemerintah) dialokasikan ke Kementerian PUPR. Di dalam Kementerian PUPR, 90% anggarannya untuk 2015-2016 dialokasikan ke tiga direktorat jenderal, yaitu: Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Efisiensi dan efektivitas program infrastruktur Kementerian PUPR selama ini terkendala oleh rumitnya proses pengadaan tanah, lemahnya kapasitas pengadaan, tidak memadainya persiapan proyek infrastruktur, dan lemahnya perencanaan infrastruktur dan sistem pengerjaannya. Karena undang-undang pengadaan tanah yang baru sudah diterapkan dan upaya penguatan kapasitas pengadaan dilakukan terus-menerus, saat ini yang menjadi hambatan utama adalah kurangnya persiapan proyek infrastruktur secara memadai dan buruknya sistem perencanaan dan pengerjaan infrastruktur, sehingga sangat membatasi kemampuan Kementerian PUPR untuk menyampaikan infrastruktur secara tepat waktu dengan mutu yang baik.

Kurangnya persiapan proyek utamanya disebabkan oleh (i) kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan kajian, survei, rancangan, serta izin lingkungan dan pengadaan tanah yang diperlukan; dan (ii) rendahnya mutu studi kelayakan dan rancangan teknik yang terperinci, dan hal tersebut menyebabkan banyak yang perlu dikerjakan ulang saat pelaksanaan proyek. Buruknya perencanaan dan penyampaian infrastruktur terutama diakibatkan oleh program pembangunan infrastruktur yang terpisah satu sama lain dan berjangka pendek, standar rancangan yang tidak tepat atau sudah ketinggalan zaman, fragmentasi proyek tecermin pada banyaknya kontrak kecil berjangka pendek, mutu konstruksi yang buruk, dan pemeliharaan infrastruktur yang tidak efektif. Karena itu, perbaikan persiapan proyek serta perencanaan dan pengerjaan infrastruktur akan sangat penting bagi Kementerian PUPR untuk memenuhi target pembangunan infrastrukturnya yang ambisius dan meningkatkan nilai yang diperoleh dari uang yang dibelanjakan, mengingat adanya kenaikan signifikan pada anggaran infrastruktur.

Dampak	Tercapainya tujuan infrastruktur dari Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian PUPR
Hasil Proyek	
Uraian Hasil	Menguatnya kapasitas Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Sumber Daya Air untuk merancang dan melaksanakan program investasi publik Kementerian PUPR secara efisien.
Kemajuan Menuju Hasil	
Kemajuan Pelaksanaan	
Uraian Keluaran Proyek	<p>Meningkatnya mutu proyek infrastruktur dengan pengerjaan yang tepat waktu</p> <p>Menguatnya kapasitas manajemen investasi publik</p>
Status Kemajuan Pelaksanaan (Keluaran, Kegiatan, dan Persoalan)	Pemilihan konsultan untuk manajemen proyek di setiap lembaga pelaksana dan satu konsultan di pusat penelitian bendungan, direktorat jenderal sumber daya air, sedang berjalan dan telah mencapai berbagai tahap pemilihan.
Lokasi Geografis	

Kategori Perlindungan

Lingkungan	C
Pemindahan Bukan dengan Sukarela	C
Masyarakat Adat	C

Ringkasan Aspek Lingkungan dan Sosial

Aspek Lingkungan
Pemindahan Bukan dengan Sukarela
Masyarakat Adat

Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Selama Rancangan Proyek
Selama Pelaksanaan Proyek

Peluang Bisnis

Layanan Konsultasi	Tanggal diiklankan pertama peluang bisnis adalah 30 November 2016
--------------------	---

Staf yang Bertanggung Jawab

Pejabat ADB yang Bertanggung Jawab	Aziz K. Haydarov
Departemen ADB yang Bertanggung Jawab	Departemen Asia Tenggara (<i>Southeast Asia Department</i> - SERD)
Divisi ADB yang Bertanggung Jawab	Indonesia Resident Mission
Lembaga Pelaksana	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal SEKJEN@PU.GO.ID Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta, Selatan, Indonesia

Jadwal

Persetujuan Konsep	30 Okt 2015
Pencarian Fakta	24 Mar 2016 sampai 24 Mar 2016
Rapat Kajian Manajemen	21 Jun 2016
Persetujuan	10 Nov 2016
Misi Kajian Terakhir	-
PDS Terakhir Diperbarui	29 Mar 2017

Pinjaman 3455-INO

Tonggak

Persetujuan	Tanggal Penandatanganan	Tanggal Efektif	Selesai		
			Orisinal	Direvisi	Aktual
10 Nov 2016	28 Nov 2016	21 Des 2016	30 Jun 2020	-	-

Rencana Pembiayaan		Pemanfaatan Pinjaman			
	Total (Nilai dalam US\$ juta)	Tanggal	ADB	Lainnya	Persentase Bersih
Biaya Proyek	167,60	Pemberian Kontrak Kumulatif			
ADB	148,20	10 Nov 2016	0,00	0,00	0%
Pendamping	19,40	Pencairan Kumulatif			
<i>Cofinancing</i>	0,00	10 Nov 2016	0,00	0,00	0%

Lembar Data Proyek (Project Data Sheets/PDS) berisi informasi ringkas mengenai proyek atau program: Karena PDS merupakan pekerjaan yang sedang berjalan, beberapa informasi mungkin tidak disertakan dalam versi awal, tetapi akan ditambahkan setelah informasi tersedia. Informasi mengenai proyek yang diusulkan bersifat tentatif dan indikatif.

ADB memberikan informasi yang terkandung dalam lembar data proyek (PDS) ini semata-mata sebagai sumber daya bagi penggunaannya, tanpa jaminan apa pun. Meskipun ADB berupaya menyediakan konten bermutu tinggi, informasi ini diberikan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa batasan, jaminan mengenai kelayakan jual, kecocokan bagi tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. ADB secara khusus tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi yang bersangkutan.